

**Kebijakan, Konflik, dan
Perjuangan Agraria Indonesia
Awal Abad 21**

(Hasil Penelitian Sistematis STPN, 2012)

**Kebijakan, Konflik, dan Perjuangan Agraria Indonesia Awal Abad 21
(Hasil Penelitian Sistematis STPN, 2012)**

Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat,
Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Cetakan pertama, 2012

Penulis : Tim Peneliti STPN

Penyunting : Ahmad Nashih Luthfi

Desain cover : Dani RGB

Layout : Eko RGB

ISBN: 978-602-7894-03-7

Penerbit:

Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat,
Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Gedung Pengajaran Lantai II,
Jalan Tata Bumi nomor 5, Banyuraden, Gamping, Sleman, Yogyakarta 55293
Telp: 0274-587239, e-mail: pppm_stpn@yahoo.com

website: <http://pppm.stpn.ac.id/>

PERAMPASAN TANAH GLOBAL PADA ABAD XXI ¹

*Dwi Wulan Pujiriyani, Vegitya Ramadhani Putri, Muhammad Yusuf, M.
Bahtiar Arifin*

Ringkasan

Laporan penelitian ini merupakan penelitian *deskstudy* mengenai tren perampasan tanah abad 21 yang jamak disebut dengan istilah *land grabbing*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *land grabbing* atau perampasan tanah dihadirkan dengan penyebutan yang lebih halus dengan istilah tekanan komersial terhadap tanah (*commercial pressure on land*) dan akuisisi tanah berskala besar (*large scale land acquisition*). Ketiga penyebutan ini pada kenyataannya mengindikasikan sebuah proses pengambilalihan tanah dalam skala besar baik dalam bentuk konsesi, sewa maupun jual beli yang ditujukan untuk akumulasi kapital. Krisis pangan dan energi merupakan dua isu utama yang dimitoskan untuk memuluskan jalan masuk skema perampasan ini dalam sebuah skenario untuk ‘mengatasi dampak krisis’ dan ‘percepatan pembangunan’. Manipulasi dan hadirnya berbagai formulasi kebijakan mengorkertrasi perampasan tanah dengan sangat rapi dimana penyingkiran komunitas lokal (petani) dan keberpihakan kepada modal merupakan potret yang jamak dijumpai. Perampasan tanah (*land grabbing*) merupakan fenomena global yang terjadi di berbagai belahan dunia termasuk Indonesia. Di Indonesia, *land grabbing* bukanlah persoalan yang baru. Wajah lama *land grabbing* yang pernah hadir pada masa kolonial, semakin menguat bersamaan dengan hadirnya skema Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI). Pulau-pulau terluar (*outer*

1 Laporan ini merupakan bagian pengantar atau kerangka dari anotasi bibliografi mengenai *land grabbing*. Ada sekitar 125 artikel yang direview untuk penyusunan anotasi bibliografi ini. Anotasi bibliografi dikelompokkan dalam 4 kluster tema yaitu perampasan tanah sebagai resiko; perampasan tanah sebagai peluang dan resiko; perampasan tanah sebagai peluang dan perampasan tanah di Indonesia. pengelompokan ke dalam 4 kluster ini dilakukan dengan pengembangan konsep politik makna pengambilalihan tanah.

island) dianggap sebagai lokasi paling ideal untuk menjadi target investasi. Investasi ini mewujudkan secara nyata dalam proyek-proyek nasional yang ambisius. Perampasan tanah dihadirkan dengan sangat natural sebagai sebuah ‘kebutuhan’ dalam narasi ‘pengadaan tanah untuk pembangunan’.

Laporan ini merupakan bagian pengantar atau kerangka dari anotasi bibliografi mengenai *land grabbing*. Ada sekitar 125 artikel yang direview untuk penyusunan anotasi bibliografi ini. Anotasi bibliografi dikelompokkan dalam 4 kluster tema yaitu perampasan tanah sebagai resiko; perampasan tanah sebagai peluang dan resiko; perampasan tanah sebagai peluang; dan perampasan tanah di Indonesia. pengelompokan ke dalam 4 kluster ini dilakukan dengan pengembangan konsep politik makna pengambilalihan tanah.

Pengantar

The Indigenous peoples will lose their simple ways of life that preserve the forest and nature. Smallholders farmers without their farms will become ‘armers’. The children will grow up detached from real possession of land, or merely in a virtual world where the only farm they could tend would be the internet game ‘farmville’ (Lok Niti, 2012: 6)

Perampasan tanah atau *land grabbing* menjadi salah satu sorotan dari persoalan agraria kontemporer. Istilah perampasan tanah atau *landgrabbing* muncul pertama kali pada tahun 2008. Laporan yang dibuat oleh GRAIN² pada tahun 2008 merupakan pernyataan pertama mengenai tren global *land grabbing* yang terutama dikaitkan dengan promosi bahan bakar nabati dan pangan untuk ekspor. Segera setelah kelompok masyarakat sipil dan media melakukan kritik, pada bulan April 2009, *International Food Policy Research Institute* (IFPRI) mengeluarkan wacana bahwa sejak tahun 2006, 15 sampai 20 juta hektar tanah-tanah pertanian di negara berkembang telah dijual atau disewakan atau sedang berada dalam proses penawaran untuk dijual atau disewakan kepada investor asing. Laporan ini mengidentifikasi beberapa kasus yang kebanyakan terjadi di Afrika. *International Institute for Environment and Development* (IIED) sebuah

2 GRAIN adalah sebuah organisasi non profit internasional yang bekerja untuk mendukung kelompok petani kecil dan gerakan sosial dalam perjuangan mereka untuk memperoleh kontrol komunitas dan sistem pangan berbasis diversitas. Sebagian besar kerja GRAIN berorientasi untuk dan dilakukan di Afrika, Asia dan Amerika Latin.

LSM di London mengikuti jejak IFPRI dengan laporan mereka yang menyatakan bahwa 2,4 juta hektar tanah di Afrika telah dialokasikan untuk investasi karena dianggap sebagai tanah yang tidak digunakan (lahan-lahan tidur). Sejak saat itu perhatian dunia mengenai *land grab* semakin meningkat baik di kalangan aktivis, non aktivis, media dan kebijakan (Borras dan Franco, 2011)

Tren akuisisi tanah menunjukkan satu fenomena dimana tanah menjadi daya tarik baru yang diburu oleh investor. Gelombang investasi global telah menjadikan tanah sebagai target perburuan untuk memaksimalkan keuntungan. Tanah bersinonim dengan uang, sementara uang bersinonim dengan kekuasaan, lebih banyak tanah berarti lebih banyak uang dan lebih banyak uang berarti lebih banyak kekuasaan dan lebih banyak tanah.³

Land = Money = Power = More Land = More Money =
More Power = More and more Land

Pangan dan energi adalah pemicu akuisisi tanah yang menjadi pintu masuk untuk melihat persoalan ini. Makanan atau pangan merupakan kebutuhan yang paling mendasar. Persoalan pangan merupakan pertarungan eksistensi sebuah negara. Suatu negara bangsa akan rapuh eksistensinya, apabila pemerintah tidak dapat menyelenggarakan dan menggerakkan rakyat untuk mengadakan pangan (Ndaru, 2011; Wahono, 2011). Daya tawar sebuah negara akan melemah ketika yang menjadi bahaya adalah kekurangan pangan rakyatnya. Mengacu pada Tauchid (2009:3), akuisisi tanah atau juga bisa dikatakan sebagai perebutan tanah serupa halnya dengan perebutan makanan dan perebutan tiang hidup manusia. Siapa yang menguasai tanah, maka dia akan menguasai makanan. Persoalan pangan juga tidak dapat dilepaskan dengan energi. Setiap kali terjadi isu kenaikan harga minyak, bisa dipastikan akan segera diikuti dengan kenaikan harga pangan (bahan-bahan pokok) (Topatimasang, 2004:3).

Tingginya kebutuhan akan pangan dan energi menjadi persoalan tersendiri yang kemudian melahirkan fenomena perburuan tanah untuk menopang keamanan pangan dan menyediakan sumber energi yang cukup. Akuisisi tanah yang terjadi menunjukkan bahwa ada pertarungan perebutan lahan untuk kepentingan pangan atau kepentingan biofuel. Mengapa akuisisi tanah menjadi jawaban untuk kebutuhan pangan dan

3 Ditsi Carolino. 2010. Walk for Land Walk for Justice, the Story of The Sumilao Farmers in Bukidnon. International Land Coalition.

energi yang tinggi? Benarkah akuisisi tanah menyelesaikan persoalan krisis pangan dan energi? Dua pertanyaan pokok inilah yang akan dikaji dalam penelitian ini.

Proses Kerja dan Metode Penelusuran Pustaka

Penelitian ini dilakukan dengan metode kajian pustaka (*desk study*) dengan bibliografi beranotasi sebagai outputnya.⁴ Dalam penelitian kepustakaan ini, penyusunan anotasi bibliografi dilakukan dalam beberapa tahapan atau proses kerja yaitu penelusuran sumber, review naskah dan penyusunan anotasi bibliografi seperti dapat dicermati dalam skema berikut ini:

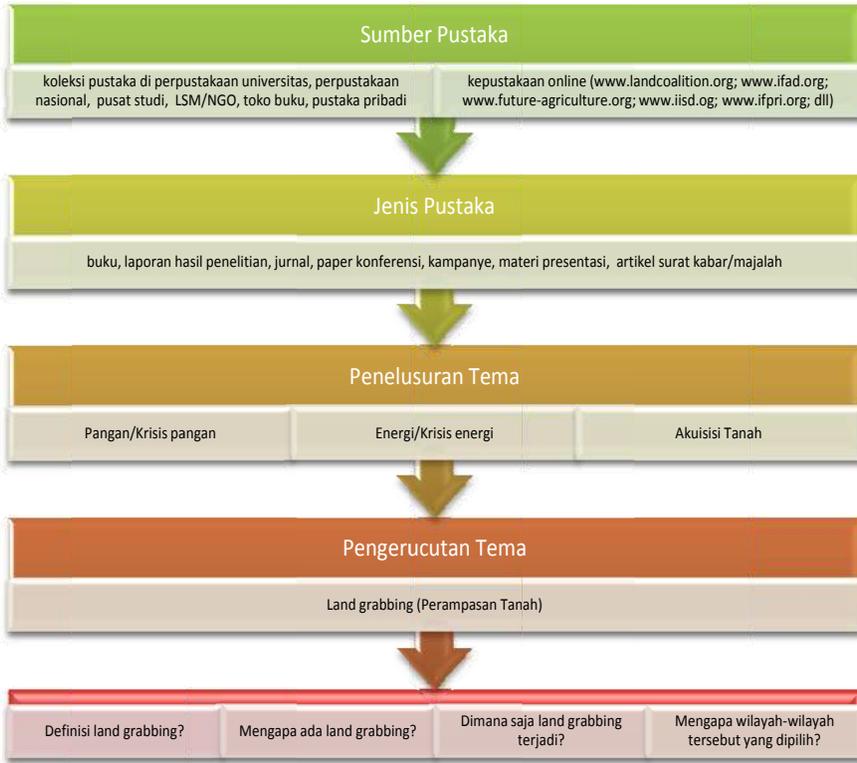


Gb. 1 Metode Penelusuran Pustaka

Proses kerja dalam tahap penelusuran pustaka lebih banyak difokuskan pada pengumpulan, inventarisasi dan seleksi literatur. Sementara itu

4 Anotasi bibliografi dapat didefinisikan sebagai 'a separate paper, journal article, appendix to journal article or complete book consisting a series of entries on a single theme, organized either alphabetically, by date or by topic. Istilah anotasi bibliografi dibedakan dengan bibliografi yang didefinisikan sebagai an organized list of works consulted when you are doing research on a particular topic. Membuat anotasi berarti membuat catatan-catatan, memberi penjelasan atau komentar tentang suatu buku atau teks. Tujuan dari anotasi bibliografi adalah untuk menyajikan kepada pembaca mengenai sebuah topik tertentu secara jelas dan komprehensif. Dikatakan bahwa dalam penyajian ini, sebuah anotasi bisa menampilkan 'a birds-eye view' atau 'general review' dari suatu bidang tertentu yang lebih lanjut dapat dimanfaatkan sebagai penyiapan proposal studi lanjutan atau review literatur (Sally Wehmeier (ed). 2000. Oxford Advanced Learners Dictionary. Oxford: Oxford University Press)

proses membaca dan review literatur dilakukan pada tahap kedua untuk kemudian diakhiri di tahap ketiga dengan menyusun dan mengkerangkai anotasi bibliografi. Secara keseluruhan, riset kepustakaan sampai dengan penulisan anotasi ini dilakukan dari mulai akhir bulan Mei 2012 sampai dengan bulan Oktober 2012.



Gb. 2. Proses penyusunan anotasi bibliografi

Proses kerja penyusunan anotasi bibliografi ini dimulai dengan penelusuran kepustakaan baik cetak maupun online. Jenis pustaka yang direview terdiri dari buku, makalah seminar, laporan hasil penelitian, jurnal, paper konferensi, materi presentasi dan artikel surat kabar/majalah. Sumber kepustakaan sendiri tidak dibatasi pada sebaran wilayah, melainkan lebih ke pengkayaan tema. Dalam artian, anotasi bibliografi ini tidak semata menyoroti kasus akuisisi tanah untuk pangan dan energi melainkan diperluas sesuai dengan kompleksitas dan dinamika persoalan *land grabbing* yang dijumpai setelah melakukan proses review. Kerangka

yang lebih umum digunakan dalam penelusuran pustaka yaitu dengan mengacu pada beberapa pertanyaan berikut ini yaitu: Apa definisi akuisisi tanah? Mengapa terjadi akuisisi tanah? Dimana akuisisi tanah terjadi? Mengapa wilayah-wilayah ini yang dipilih? dan apa dampaknya?

Dalam proses penyusunan anotasi, sumber-sumber bacaan yang telah terkumpul kemudian dilakukan proses review. Hasil pembacaan atau review inilah yang untuk selanjutnya dikelompokkan kedalam 4 tema khusus yang mengacu pada skema pendefinisian *land grabbing*.

Sementara itu, periodisasi naskah yang dieview pada awalnya juga tidak dibatasi pada tahun tertentu. Ekplorasi sumber bacaan dilakukan secara meluas. Namun pada kenyataannya temuan-temuan sumber pustaka tentang *land grabbing* memang jamak dijumpai pada literatur-literatur yang berusia lebih muda yaitu tahun 2000-an ke atas. Sumber-sumber bacaan yang disusun dalam bibliografi ini juga sebagian besar berangka tahun 2010-2012. Kebaruan sumber-sumber bacaan ini menjadi satu indikasi bahwa debat secara terbuka mengenai perampasan tanah merupakan bagian dari persoalan agraria kontemporer yang semakin mendapat banyak sorotan.

Akuisisi Tanah Kontemporer

Pengambilalihan tanah dalam skala luas untuk tujuan komersial bukan hal yang baru. Columbus pernah melakukannya ketika menemukan Amerika, begitu pun yang dilakukan ketika kaum kulit putih mencaplok wilayah suku Maori di New Zeland dan suku Zulu di Afrika Selatan yang semuanya disertai dengan pengusiran terhadap komunitas pribumi (GRAIN, 2008:3). Sebagaimana dikutip dalam Laksmi (2011), sejarah kolonialisme dan imperialisme di belahan Dunia Selatan (Global South/negara-negara Dunia Ketiga) sejak abad 16-17 sebenarnya sudah menciptakan suatu tatanan dunia yang terbelah, yakni: wilayah-wilayah kekuasaan ekonomi dan politik di Dunia Barat yang mendapatkan sumber kekuasaannya melalui penghisapan dan pencaplokan beragam sumber daya di Belahan dunia Selatan. Salah satunya dicontohkan dengan gula sebagai komoditi yang menggambarkan konstruksi hubungan imperialistik. Pada abad ke-17, gula belum dikenal di Eropa, lalu pada abad ke-18 gula telah menjadi barang mewah yang memanjakan lidah para bangsawan, akhirnya pada abad ke-19 sudah

menjadi kebutuhan pokok kelas menengah Eropa. Kemewahan rasa ini didapatkan salah satunya dengan cara menggantikan hampir seluruh sawah di Jawa dengan perkebunan tebu, melalui sistem kontrak/sewa yang menekan petani tebu, bahkan menyebabkan mereka kekurangan pangan atau terpaksa melepaskan tanah-tanahnya dan terlempar dari penghidupan di pedesaan ke kantong-kantong kemiskinan di perkotaan. Imperialisme yang berlangsung di masa lalu berintikan pada penguasaan wilayah (teritorialisasi) dan pembentukan pusat-pinggiran.

Sekarang ini, menurut McMichael (2008:216) globalisasi kontemporer hidup dari sumber yang sama, yakni: tekanan terhadap sumber-sumber kekayaan alam di Dunia belahan Selatan. Negara-negara poskolonial tetap pada posisi sama seperti ketika mereka dijajah, yaitu: mereka tidak lagi mengkonsumsi apa yang mereka produksi, tapi memproduksi dan mengekspor seluruh kebutuhan pangan dunia di Belahan Barat dalam bentuk bahan mentah. Tidak hanya jenis-jenis pangan pokok (gandum, sorghum, beras), tetapi juga apa yang disebut sebagai jenis 'ekspor non-tradisional', seperti bunga-bunga, buah, sayuran, udang, bahkan pakan ternak untuk sapi yang mereka ekspor dagingnya ke negara dunia ketiga dengan murah. Akibatnya terjadi apa yang disebut oleh McMichael sebagai penciptaan tatanan baru hubungan-hubungan sosial produksi, konsumsi dan reproduksi.

Borras et al (2012) menyebut *land grabbing* yang muncul sekarang ini sebagai *land grabbing* kontemporer yaitu:

“The capturing of control of relatively vast tract of land and other natural resources through a variety of contexts and forms that involve large-scale capital that often shifts resources use orientation into extractive character, whether for international or domestic purposes as capital’s response to the convergence of food, energy, and financial crises, climate change mitigation imperatives and demands for resources from newer hubs of global capital”

“Upaya untuk memperoleh kontrol atas tanah dalam skala yang luas atau juga sumberdaya alam yang lain melalui berbagai konteks dan bentuk yang mencakup modal dalam jumlah besar yang seringkali mengubah orientasi penggunaan sumberdaya ke dalam sifat-sifatnya yang ekstraktif, apakah untuk tujuan internasional atau domestik, sebagai repon terhadap konvergensi pangan, energi dan krisis keuangan, serta mitigasi iklim dan permintaan sumberdaya dari kapital yang baru”

Contemporary land grabbing ditandai dengan 3 hal: 1) *control grabbing* yaitu memperoleh kekuasaan untuk mengontrol dan menggunakan tanah dan sumberdaya lain seperti air. *Control grabbing* dapat dimanifestasikan dalam sejumlah cara dari *land grabbing*, *water grabbing* sampai dengan *green grabbing*; 2) luasan dan jumlah modal; 3. terjadi karena dinamika strategi akumulasi kapital yang merupakan respon dari krisis multidimensional: pangan, energi/bahan bakar, perubahan iklim dan krisis keuangan (dimana kemudian para pemodal mulai mencari peluang investasi baru yang lebih aman.

Quizon (2012) menggarisbawahi bahwa gelombang investasi tanah ini memiliki dua pola yang baru yaitu: skalanya yang lebih luas serta peran pemerintah yang lebih besar. Gelombang investasi tanah yang baru ini juga berbeda dengan investasi asing di masa lalu karena investasi baru ini: lebih banyak memburu sumberdaya (tanah dan air) dibandingkan dengan komoditas dan pasar; mencari perluasan produksi dibandingkan untuk kepentingan ekspor komersial; dan mencakup produksi aktual dibandingkan *joint venture* atau *contract farming*.

Definisi Akuisisi Tanah

Penelusuran pustaka menunjukkan bahwa akuisisi tanah disebutkan dengan istilah atau terminologi yang berbeda-beda. Inilah yang kemudian disebut Savitri (2011) sebagai politik makna pengambilalihan tanah. Terdapat tiga istilah atau terminologi untuk menyebut proses pengambilalihan tanah yaitu '*large scale land acquisition* yang dimunculkan oleh World Bank, '*land grabbing*' yang dimunculkan oleh GRAIN-sebuah LSM asal Spanyol serta '*commercial pressure on land*' yang dimunculkan oleh *International Land Coalition* (ILC) yang mengklaim dirinya sebagai lembaga internasional yang mewadahi aneka corak lembaga yang berkepentingan pada masalah tanah. *Large scale land acquisition* atau akuisisi tanah skala luas adalah sebuah sebutan netral untuk menggambarkan bahwa gelombang akuisisi tanah yang terjadi di negara-negara miskin merupakan bagian dari upaya untuk mendayagunakan potensi pertanian di negara tersebut yang belum tergalai maksimal. Dalam konteks ini akuisisi tanah skala luas dianggap sebagai bagian dari solusi mengatasi krisis pangan dengan tersedianya cukup ruang untuk memproduksi sumber pangan sekaligus menjawab

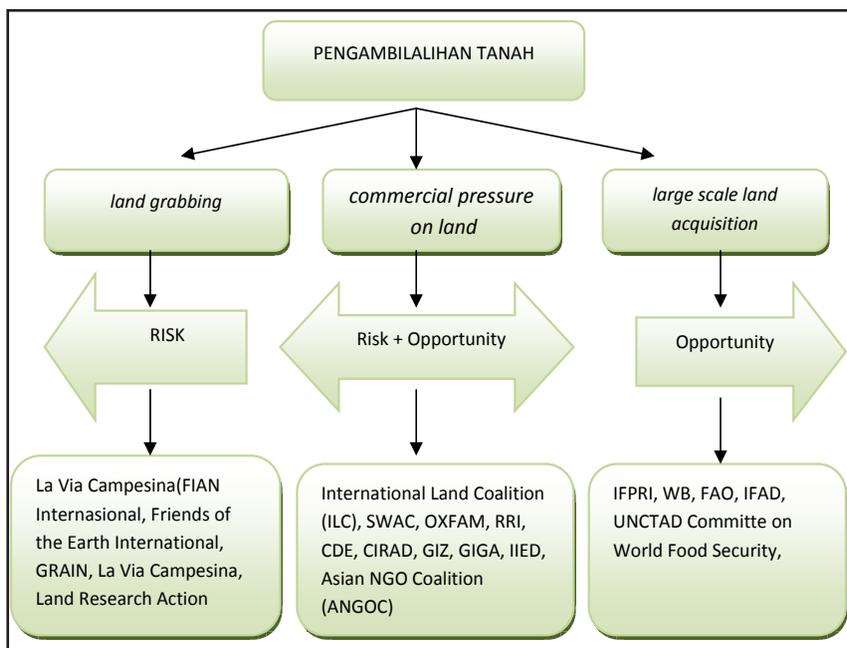
kebutuhan pembangunan di negara-negara miskin. Narasi ini diusung oleh agen-agen pembangunan internasional seperti Bank Dunia, FAO, IFAD, dan IIED.

Berbeda dengan istilah pertama, istilah '*land grabbing*' atau perampasan tanah hadir sebagai wacana tandingan dengan semacam misi untuk memperingatkan adanya gejala besar penghilangan pertanian yang dikelola oleh petani kecil dan berkembangnya ancaman bagi keberlangsungan penghidupan pedesaan di berbagai tempat di seluruh dunia. Pengambilalihan tanah skala besar dalam konteks ini dianggap bukanlah sesuatu yang 'baik-baik saja' melainkan sebagai sebuah skenario penguasaan tanah secara langsung yang membahayakan. Narasi ini banyak disuarakan oleh para pendukung pendekatan berbasis keadilan sosial dan hak asasi manusia.

Sementara itu istilah yang *commercial pressure on land* atau tekanan komersial atas tanah hadir sebagai penyebutan yang dianggap lebih objektif, berada diantara pro dan kontra yang muncul dari terminologi *large scale land acquisition* dan *land grabbing*. Penyebutan ini dihadirkan untuk meluruskan kesalahpahaman yang muncul dari istilah *land grabbing* yang dianggap terlalu menempatkan proses pengambilalihan tanah sebagai sesuatu yang 'negatif', 'ilegal', dan 'menyimpang'. Dalam konteks ini, disebutkan bahwa tekanan komersial akan terus hadir dan investasi asing pada dasarnya tidak perlu di'haram'kan, melainkan hanya perlu diatur untuk memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan dalam skema-skema *code of conduct* (kode etik) yang mengikat.

Perbedaan penyebutan ini memberikan gambaran bahwa terdapat perbedaan sudut pandang dalam melihat persoalan pengambilalihan tanah, mulai dari yang kontra atau menentang, yang berada di posisi abu-abu dan yang menerima. Keragaman dapat dilihat bahkan dalam kelompok masyarakat sipil (lokal, nasional dan internasional) seperti juga dalam komunitas lokal. Perbedaan ini berkaitan dengan perspektif kelas sosial, dan sudut pandang ideologis atau politis. Salah satu contoh adalah yang dimunculkan oleh Sarikat Petani (Via Campesina) dan International Federation of Agricultural Producers (IFAP). IFAP dibentuk oleh petani kelompok petani menengah dan kaya yang berorientasi komersial. Posisi ideologisnya dipengaruhi oleh kelompok petani kelas menengah kaya yang memiliki kepentingan komersil dalam federasi dunia. Sebaliknya, Via Campesina adalah sebuah gerakan petani miskin dan petani kecil

internasional di negara berkembang dan industrial. Gerakan mereka menyuarakan pentingnya koalisi global. Posisi ideologis pada isu agraria dibentuk oleh kepentingan kelompok petani miskin. IFAP dan Via Campesina merepresentasikan posisi yang bertentangan. IFAP melihat isu *biofuel* sebagai sebuah kesempatan sementara Via Campesina melihatnya sebagai ancaman.



Gambar 3. Skema Pendefinisian Akuisisi Tanah
 Sumber: Disarikan dari Savitri, 2011

Selain terminologi yang berbeda, akuisisi tanah atau jamak disebut *land grab* juga memiliki definisi yang beragam diantaranya sebagai berikut:

1. Perampasan sumber daya alam termasuk tanah dan air serta kontrol berkaitan dengan manfaat dan penggunaannya dengan atau tanpa pemindahan kepemilikan yang biasanya dilakukan dari kelompok miskin atau marginal kepada aktor yang memiliki kekuasaan (Borras dan Franco, 2012)

2. Akuisisi dalam skala luas terhadap tanah, hak-hak terkait tanah, dan sumberdaya tanah oleh korporasi (baik institusi bisnis, nirlaba maupun institusi publik (White, 2012)
3. Kelanjutan dari kekerasan yang dilakukan untuk mengambil lahan milik umum dalam rangka mengakomodasi kepentingan ekspansi kapital dalam logika 'pasar-bebas' sebagai retorika ideologi neoliberal (Mc Michael, 2012).
4. Proses dimana kepemilikan tanah yang dianggap 'kosong', 'tidur' atau 'tidak produktif' berpindah tangan dengan transaksi yang menggiurkan untuk dikembangkan menjadi perkebunan skala besar untuk menghasilkan pangan atau agrofuel atau keduanya (Bollin, 2011)
5. Pembelian atau penyewaan tanah dalam skala luas di wilayah negara-negara berkembang oleh negara-negara kaya, tapi miskin pangan dan investor swasta guna memproduksi hasil tanaman untuk diekspor (Daniel & Mittal, 2009)
6. Akuisisi (sewa, konsesi, pembelian secara langsung) yang dilakukan oleh korporasi atau negara pada tanah pertanian berskala luas (diatas 10.000 hektar) di negara lain dan dalam jangka waktu yang lama (seringkali dari 30 sampai 99 tahun), yang digunakan sebagai basis produksi pangan untuk tujuan ekspor (GRAIN, 2008)

Sementara itu Zagma (2011) menyebutkan bahwa *land grabbing* sebenarnya merupakan bentuk lanjut dari akuisisi tanah. Akuisisi tanah dapat menjadi *land grabbing* ketika:

1. Terdapat pelanggaran/kekerasan HAM khususnya pada hak-hak kesetaraan perempuan;
2. Tidak didasarkan pada prinsip FPIC bagi masyarakat yang terkena dampak;
3. Tidak didasarkan pada assesmen yang menyeluruh, mengabaikan dampak sosial, ekonomi dan lingkungan termasuk gender;
4. Tidak didasarkan pada kontrak/perjanjian yang transparan dengan komitmen yang jelas tentang kegiatan, tenaga kerja dan pembagian keuntungan;
5. Tidak didasarkan pada perencanaan demokratis yang efektif, penilaian yang independen dan partisipasi penuh.

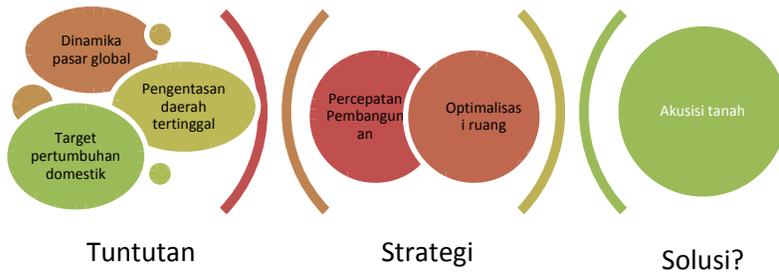
Berbeda dengan Zagema, Li (2012) justru tidak menyukai istilah *land grabbing*. Li berargumen bahwa apa yang disebut dengan *land grabbing* atau perampasan tanah adalah *boom* (ledakan), *rush* (perebutan), *scale* (skala), *extent* (perluasan), pengerukan semua (*reach of it all*), dari mekanisme, proses-proses dan dampak akuisisi tanah yang mempunyai sejarah panjang. Dalam hal ini, Li lebih suka menggunakan label '*land rush*' (berebut tanah) dibandingkan '*land grab*' (perampasan tanah). Bagi Li istilah yang kedua ini memiliki banyak polemik. Karakteristik dari fitur perebutan adalah spektakuler, tiba-tiba, berskala luas, kasatmata, sensasional, dan minat pada tanaman pangan.

Berkaitan dengan berbagai pendefinisian ini, Borrás dan Franco (2012) memunculkan persoalan mengenai tantangan dalam mendefinisikan *land grabbing*. Asumsi dominan yang selama ini dibangun dari definisi *land grabbing* cenderung berfokus pada skala (luas) akuisisi tanah yang dikaitkan dengan keberadaan investor untuk kepentingan ketahanan pangan. Dalam hal ini tantangan dalam mendefinisikan *land grabbing* berpengaruh pada pembuatan kebijakan. Definisi yang muncul seringkali terlalu sempit, sehingga melupakan pentingnya proses-proses aktual yang sedang terjadi atau justru terlalu luas, sehingga melupakan karakteristik khusus dari *land grabbing* kontemporer. Untuk menghindari persoalan ini, ada 3 ide pokok yang diusulkan oleh Borrás dan Franco berkaitan dengan pendefinisian *land grabbing* yang terjadi saat ini. Pertama, *land grabbing* pada dasarnya adalah (CG-SMU-E/A) (*Control grabbing, shift in meaning, and or use extraction/alienation*). Yang dimaksud dengan *control grabbing* adalah penggunaan kekuasaan untuk mengontrol tanah dan memperoleh keuntungan dari sumberdaya lain yang berkaitan seperti air. *Land grabbing* juga berkaitan dengan perubahan makna atau pemanfaatan atas tanah yang dikaitkan dengan pemanfaatan baru yang didasarkan pada hasrat akumulasi *capital* dengan cara mengambil alih kendali pada faktor produksi kunci, yaitu tanah. Sementara itu karakteristik selanjutnya adalah ekstraksi atau alienasi sumberdaya untuk tujuan eksternal (nasional atau internasional). *Control grabbing* diwujudkan dengan tiga cara utama: *land grab* (perampasan tanah berskala luas), (virtual) *water grabs* (perampasan sumberdaya air), dan *green grabs* (perampasan sumberdaya dengan mengatasnamakan lingkungan). Kedua, kajian *land grab* tidak semata tentang skala yang selama ini selalu disebut bahwa *land grab* berkaitan dengan transaksi tanah skala besar. Terdapat dua dimensi yang perlu

diperhatikan yaitu karakter akuisisi tanah + skala dan karakter modal. Skala dan karakter modal akan membantu untuk melihat jumlah tanah yang diperoleh dan mendeskripsikan mekanisme akuisisinya. Ketiga, perbedaan perampasan tanah yang terjadi sekarang. Perkembangan yang ada sekarang adalah munculnya *'flex crops'*: yaitu tanaman pangan yang multiguna (*food, feed, fuel, industrial material*) yang dapat dengan mudah atau fleksibel diubah pemanfaatannya yaitu: kedelai (*feed, food, biodiesel*), sugarcane (*food, ethanol*), oilpalm (*food, biodiesel, commercial/industrial uses*), corn (*food, feed, ethanol*). Selain *flex crops* juga peran negara dan modal intra regional dalam *land grabbing*. Savitri (2011) menambahkan bahwa fenomena *land grabbing* kontemporer ini dapat dibedakan dari bentuk globalisasi kapital sebelumnya yaitu: 1) kembalinya penguasaan langsung tanah, baik melalui pembelian atau penyewaan, bukan lagi penguasaan pasar komoditi semata; dan 2) investor terbesar bukan lagi investor-investor konvensional dari 'Barat' (AS dan Eropa), tetapi justru dari 'Timur', seperti: Cina, Korea Selatan, Jepang dan Timur Tengah.

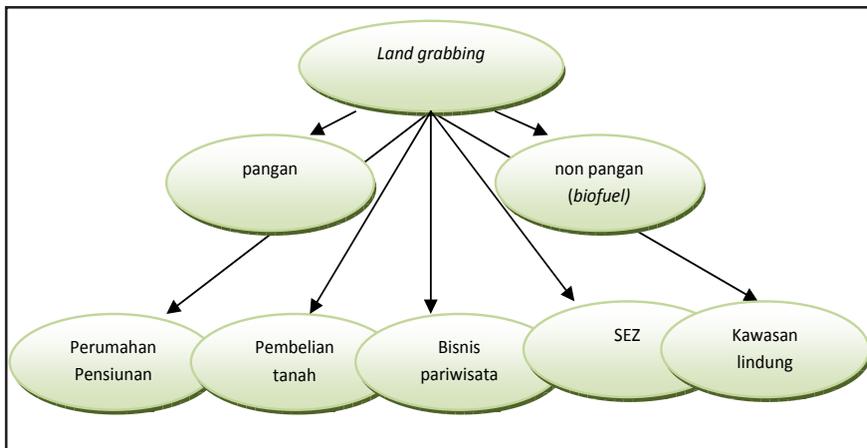
Mengapa Akuisisi Tanah?

Pangan dan energi merupakan dua pemicu utama terjadinya *land grabbing* yang awalnya ditelusuri dalam penelitian ini. Hal ini ditemukan dalam berbagai tulisan mengenai *land grabbing* yang pada umumnya menyebutkan bahwa krisis pangan dan tingginya harga minyak yang terjadi pada tahun 2008 telah menyebabkan peningkatan minat sektor swasta untuk mencari lahan pertanian tanaman pangan dalam rangka mengurangi biaya impor pangan dari negara-negara berkembang. Para investor yang sedang mencari sumber-sumber investasi baru di luar perbankan dan sektor properti, melihat ada kesempatan untuk memperoleh keuntungan dari pasar tanah pertanian. Kenyataannya akuisisi tanah hadir dalam sebuah proses yang kompleks. Akuisisi tanah hadir bersamaan dengan tuntutan dinamika pasar global, target pertumbuhan domestik dan pengentasan kemiskinan yang pada akhirnya dijawab melalui strategi percepatan pembangunan dan optimalisasi ruang. Akuisisi tanah digemakan sebagai sebuah solusi terpercaya untuk memenuhi segala tuntutan tersebut.



Gambar 4. Skenario dibalik Akuisisi Tanah
 Sumber: Data Primer, 2012

Dalam penelusuran literatur, ditemukan bahwa, ada banyak skenario dibalik terjadinya akuisisi tanah, Zoomers (2010) Bollin (2011), Borrás dan Franco (2012), serta White (2012) menunjukkan bahwa ada pemicu lain yang lebih kompleks seperti dapat dicermati dalam ilustrasi berikut;



Gambar 5. Pemicu Land Grabbing
 Sumber: disarikan dari Zoomers, 2010

Mengacu pada Zoomers (2010), ada 7 faktor yang menyebabkan proses perampasan tanah meningkat di Afrika, Asia dan Latin Amerika. Pertama adalah investasi asing untuk memproduksi pangan; kedua adalah Investasi asing pada non pertanian pangan dan untuk energi atau biofuel; ketiga adalah Pengembangan kawasan lindung, cagar alam, ekowisata; Keempat adalah Pembangunan wilayah Zona Ekonomi Khusus yang digunakan untuk pekerjaan infrastruktur skala besar dan pembangunan di perkotaan; kelima adalah Bisnis Pariwisata dalam skala besar; Kenam

adalah Pembangunan Tempat Tinggal untuk para pensiunan; dan ketujuh atau yang terakhir adalah Pembelian tanah oleh para migran di negara asal mereka. Sementara itu faktor pendorong perampasan tanah mengacu pada Bollin (2010) adalah krisis keuangan, pangan, energi dan krisis iklim global. Semua krisis global yang terjadi menumbuhkan persepsi bahwa karena jumlah penduduk diperkirakan meningkat sementara sumber daya terbatas, permintaan akan pangan dan bioenergi akan terus meningkat. Borrás dan Franco (2012) menyebutkan bahwa terdapat 4 konteks kunci untuk melihat pemicu *land grabbing* yaitu: ketahanan pangan, pengamanan energi, strategi mitigasi perubahan iklim dan permintaan sumberdaya alam oleh pusat-pusat kapital baru.

Seperti halnya Zoomers, Bollin, serta Borrás dan Franco, White (2012) mengkaitkan peningkatan kesepakatan atas tanah skala luas dengan 6 (enam) *trend* yang mendorong mekanisme akumulasi melalui investasi tanah, yaitu: (a) antisipasi global terhadap ancaman keamanan pangan. Hal ini mendorong investasi korporasi secara luas ke dalam bisnis tanaman pangan (termasuk untuk pakan ternak); (b) pengembangan bentuk ekstraksi sumberdaya baru untuk keamanan bahan bakar energi; (c) aturan lingkungan yang baru beserta perangkatnya; (d) koridor penyediaan infrastruktur dan zona ekonomi eksklusif; (e) pembentukan instrumen keuangan baru; (f) aturan, regulasi dan insentif yang disediakan oleh komunitas internasional.

Akuisisi tanah memang berjalan secara paralel berjalan dengan berbagai isu. Dalam isu konservasi misalnya, perampasan jutaan hektar tanah hadir bersama dengan skema REDD. Isu ekowisata juga menjadi salah satu bagian seperti dapat dilihat dalam proyek ekoturisme di Amazon (Balletti, 2011). Sementara itu, intervensi HAM ternyata juga menjadi salah satu pemicu dimana isu HAM dilekatkan pada persoalan akses dan kepemilikan terhadap tanah dimana tanah dianggap bagian dari pemenuhan hak ekonomi sosial dan budaya. Isu pembangunan fasilitas publik hadir dalam artikel Balakrishnan (2012) dimana pembangunan jalan raya lintas negara bagian di India telah mendorong terjadinya *land grabbing* besar-besaran di propinsi-propinsi yang dilewati jalan raya tersebut, termasuk juga pembangunan Special Economic Zone (SEZ). Sementara itu, Cina dengan kebijakan '*go green*'-nya telah mengubah wilayah-wilayah yang semula merupakan daerah pemukiman, menjadi wilayah industri yang berorientasi lingkungan. Dalam isu *developmental outsourcing* (Hofman,

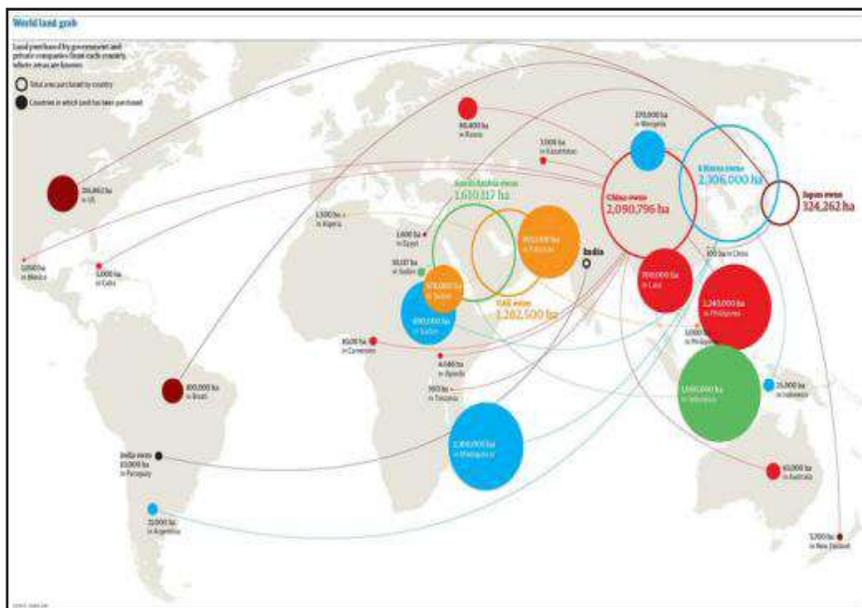
2012), ditunjukkan bahwa aktor *land grabbing* sudah beralih bukan lagi negara Eropa, tetapi negara industri baru termasuk disini bahwa negara-negara ini tidak hanya menjadi sasaran dari akuisisi tanah tetapi sekaligus juga menjadi pelaku. Hal ini bisa dilihat dari negara Cina yang ternyata melakukan penyewaan tanah besar-besaran di Amerika Latin dan pada saat yang sama tanahnya juga dijadikan sasaran akuisisi tanah. Hal serupa juga terjadi di Brazil, yang melakukan investasi di Mozambik, serta Rusia yang melakukan investasi di negara-negara eks Uni Soviet, dimana Uni Soviet sendiri menjadi target akuisisi tanah berskala besar. Beberapa artikel menyebut fenomena ini sebagai *developmental outsourcing*. Sementara itu, dalam isu *land laundering*, ditemukan bahwa pembelian tanah secara privat juga menjadi salah satu pemicu *land grabbing* besar-besaran karena ketika tanah itu menjadi milik privat, pemilik tanah bisa langsung mengalihkan tanah-tanah mereka ketika kesepakatan antara kedua belah pihak sudah terjadi. Contoh-contoh ini banyak terjadi di negara-negara Amerika Latin, dimana sertifikasi di Guatemala, Argentina dan Brazil, membuat *land grabbing* semakin meluas. Isu selanjutnya yang dijumpai adalah narkoba dan ekstasi di Amerika Latin yang seolah menjadi seperti negara dalam negara karena penguasaan kartel obat bius yang kemudian membatasi penggunaan tanah di wilayah hutan sebagai tempat untuk memproduksi ganja. Yang terakhir adalah temuan bahwa *land grabbing* ternyata telah turut mendorong migrasi penduduk dari desa ke kota. Hal ini dimungkinkan juga karena tidak adanya kepemilikan tanah di desa karena lebih memilih untuk menetap dan tinggal di kota. Hal ini menyebabkan keterikatan dengan desa menjadi renggang, sehingga pelepasan hak milik seolah menjadi sesuatu yang wajar dan tanpa beban karena mereka sudah cukup nyaman tinggal di kota. Dapat dikatakan bahwa *land acquisition* bisa menciptakan migrasi, tetapi sebaliknya migrasi juga dapat menciptakan *land grabbing*. Dalam isu perburuhan, temuan menunjukkan bahwa akuisisi tanah berskala luas, tidak memanfaatkan tenaga kerja yang ada di daerah tersebut atau dengan kata lain penguasaan besar-besaran tidak mensyaratkan akumulasi tenaga kerja besar-besaran.



Gambar 6. Isu-isu yang Paralel dengan Akuisisi Tanah
 Sumber: Disarikan dari berbagai sumber bacaan, 2012

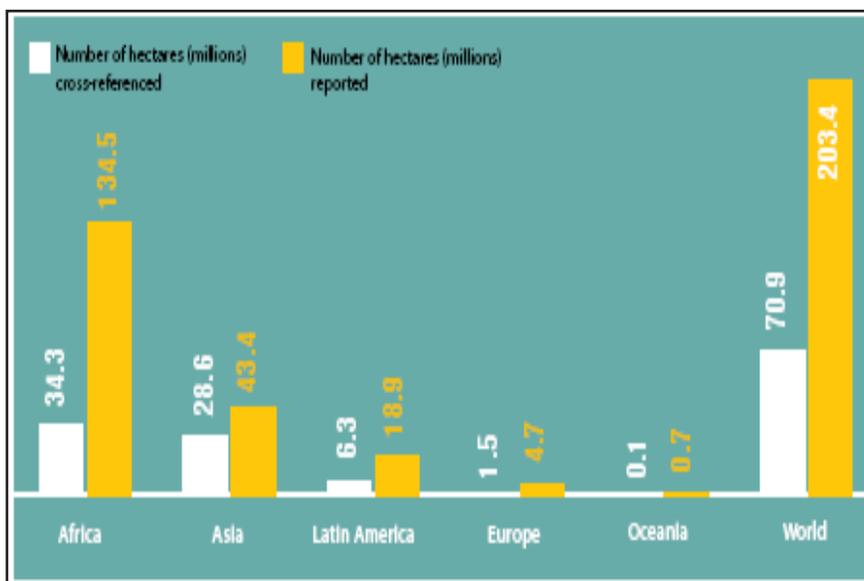
Dimana Akuisisi Tanah Terjadi?

Akuisisi tanah terjadi di banyak negara yang dalam hal ini dapat dibedakan menjadi negara investor dan negara domestik.



Gambar 7. Peta Perampasan Tanah Global
 Sumber: www.grain.org

Menurut data GRAIN (2008) investor terbesar berasal dari negara-negara Teluk dan Cina, menyusul kemudian dari Jepang, dan Korea Selatan. Qatar, misalnya, negara yang hanya memiliki 1% tanah yang dapat dibudidayakan untuk pertanian, telah membeli 40.000 hektar tanah di Kenya, Vietnam, Kamboja dan Sudan. Uni Emirat Arab telah menguasai 324.000 hektar tanah di Pakistan. Korea Selatan (Grup Daewoo) telah menandatangani transaksi penyewaan tanah seluas 1,3 juta hektar di Madagaskar. Negara-negara investor ini mencari tanah-tanah subur di negara lain. Anseuww dkk (2012:23) mencatat bahwa Afrika merupakan negara target pertama kemudian disusul Asia, Amerika Latin dan terakhir Eropa Timur dan wilayah Oceania seperti dapat dicermati dalam tabel berikut ini:



Gambar 8. Negara Target Akuisisi Tanah

Sumber: Anseuww dkk, 2012: 23

Menurut Benjaminsen (2011), Afrika merupakan target utama karena dianggap sebagai benua yang memiliki tanah melimpah dengan harga yang murah. Bollin (2011) juga menambahkan bahwa investor lebih berminat pada negara dengan indikator tata kelola pemerintahan dan perlindungan hak tanah setempat yang lemah. Indikator tata kelola pemerintah yang lemah ini salah satunya ditunjukkan dengan ketidakpastian pemilikan pemerintah sebuah negara untuk melindungi tanah-tanah yang berstatus

sebagai tanah adat (German, 2011). Kondisi serupa ini membuat status tanah menjadi sangat *negotiable*, sehingga kepentingan atau peruntukan-peruntukan yang baru lebih mudah diintervensikan. Proses intervensi ini pada berbagai kasus dimungkinkan karena tidak adanya formulasi kebijakan yang tegas atau bahkan ketika formulasi kebijakan telah ada, kenyataannya tidak pernah diimplementasikan. Kondisi-kondisi serupa inilah yang seolah telah membukakan jalan bagi proses investasi yang semakin meluas. Pada akhirnya, indikator-indikator pilihan negara yang menjadi target ini menunjukkan bahwa investor benar-benar mengarah pada proses investasi yang mudah, murah, dan sangat menguntungkan.



Gambar 9. Indikator Negara Favorit yang Menjadi Target Akuisisi Tanah
 Sumber: Disarikan dari berbagai sumber, 2012

Mekanisme Akuisisi Tanah

Mengacu pada White (2012), mekanisme *land grab* bervariasi. Pada masa kolonial proses ini terjadi dengan memanipulasi tanah ‘kosong’ (meski jelas telah dikuasai dan digunakan secara tradisional) menjadi tanah yang ‘tak bertuan’ (tidak ada pemiliknya) dan menjadikannya milik negara secara ‘resmi’. Di akhir masa penjajahan atau pasca kemerdekaan banyak negara dan masyarakat sipil yang berupaya membetulkan distorsi sejarah dengan *land reform* dan sebagainya guna mengakhiri pola kepemilikan pribadi yang luas dan mendistribusikan lahan kepada rakyat kecil. Pada paruh abad 20, Bank Dunia juga melakukan hal yang sama sebagai strategi pembangunan pertanian. Kini, banyak pemerintah dan

organisasi internasional mendukung akuisisi lahan oleh korporasi raksasa (baik dalam maupun luar negeri), biasanya dalam bentuk konsesi jangka panjang maupun bentuk ganti rugi, atas nama 'pembangunan'. Dinamika *land grab* bertumbuh lebih dari karena keinginan akumulasi agribisnis daripada kebutuhan pembangunan. Sementara itu, Taylor dan Bending, menyebutkan bahwa mekanisme akuisisi atau perolehan tanah dapat dilakukan dengan dua cara yaitu ilegal dan legal. Proses ilegal adalah proses perampasan tanah melalui suatu perjanjian transaksi tanah yang memotong prosedur formal atau juga penggunaan kekerasan militer, sementara proses legal adalah proses pengambilalihan tanah melalui prosedur formal. Bentuk-bentuk investasi yang dapat ditemukan adalah jual beli (*purchase*) dan sewa (*lease*) baik *long term lease* maupun *short term lease*. Dua bentuk investasi yang paling umum dilakukan di Asia adalah *lease* (sewa) yang dilakukan dengan dua cara: 1) pemerintah menyewakan tanah-tanah negara yang luas kepada korporasi asing dan 2) investor asing memakai skema *joint venture* atau kemitraan dengan korporasi atau pemilik tanah domestik.

Akuisisi tanah bisa dipastikan selalu hadir dalam wacana 'pendayagunaan tanah untuk pembangunan'. Hal inilah yang bisa ditelusuri dari narasi awal yang dijadikan pintu masuk bagi terjadinya akuisisi tanah yaitu dengan membuat identifikasi mengenai tanah-tanah yang disebut 'kosong', 'tidur', 'tidak produktif', 'marginal', 'terdegradasi, terlantar, tanah tak bertuan, 'idle', 'waste', 'unproductive, public', 'surplus', 'vacant', 'unused'.⁵

Mengacu pada konsep Anna Tsing seperti dikutip Li (2012) inilah yang kemudian disebut dengan tradisi investasi 'pinggiran', sebuah mitos kultural tentang 'peruntungan' dan ide tentang wilayah yang kosong bisa membawa keuntungan yang berlimpah. Hal ini pula yang disinggung Baka (2012) dengan menyebutkan bahwa konsep tanah marginal merupakan elemen sentral dalam debat mengenai landgrab karena dianggap sebagai obat mujarab bagi berbagai penyakit lingkungan, ekologis, dan pembangunan ekonomi bagi negara-negara miskin. Akuisisi

5 Tanah-tanah dalam kategori ini pada kenyataannya merupakan tanah yang sedang didayagunakan oleh pihak lain baik langsung maupun tidak langsung untuk kegiatan rumah tangga, usaha kecil, penggembalaan, maupun areal ladang berpindah. Namun semua kategori pemanfaatan ini dilihat kurang memiliki nilai ekonomis, sehingga tidak cukup layak disandingkan dengan maksimalisasi keuntungan yang sedang dikejar dalam skema investasi tanah-tanah pertanian untuk perusahaan flex crop maupun kepentingan bisnis yang lain

tanah dianggap sebagai bagian dari upaya mendayagunakan tanah-tanah dalam kategori ini agar bisa lebih produktif dan bermanfaat.

Mengacu pada White (2012) negara bekerja dalam menginisiasi kebijakan dan administrasi di seputar paham konsep 'tanah-tanah yang marginal' serta memfasilitasi investasi tanah yang meliputi: invensi/justifikasi; definisi, reklasifikasi, kuantifikasi; Identifikasi; akuisisi/pengambilalihan dan realokasi atau disposisi. Semua ini digunakan untuk mentransformasikan sumberdaya (sebagian besar dalam kendali negara) menjadi faktor produksi yang produktif untuk memperbarui investasi skala luas yang berbasis tanah. Selain identifikasi ini, akuisisi tanah juga disebut sebagai jawaban atau solusi dari krisis yang terjadi. Kedua narasi inilah yang menjustifikasi terjadinya *land grabbing* dan menempatkannya sebagai sebuah 'kebutuhan' dan 'keharusan'.⁶

Skema pembenaran ini mengacu pada Reilly dan Bockel (2010) diorkestrasi dengan serangkaian formulasi kebijakan internasional seperti hadirnya CoC (*Code of Conduct*) atau kode etik internasional seperti misalnya *Principle for Responsible Agricultural Investment that Respect Rights, Livelihood and Resources* yang dimunculkan oleh FAO, IFAD, UNCTAD dan WB serta panduan sukarela (*voluntary guideline*) seperti *Responsible Governance of Tenure of Land and Other Natural resource* yang dimunculkan oleh CFS (*Committee on World Food Security*) dengan panduannya. Disinilah fenomena *land grabbing* kemudian menjadi saksi begitu banyaknya reformulasi kebijakan yang muncul. Negara-negara sasaran investasi pun digambarkan memiliki wujud yang beragam seperti: Indonesia dengan ekspansi perkebunan sawit pada tanah-tanah adat, Pakistan dengan kebijakan pertanian korporasinya (*Corporate Agriculture Farming Policy*), atau Filipina dengan sisi lain reforma agraria dan

6 Fakta menunjukkan bahwa meskipun pemerintah memiliki mandat yang jelas untuk melindungi hak adat pada level negosiasi yang berbeda (potret tanah, pemberian ganti rugi dan kesepakatan negosiasi antara komunitas dan investor), proses yang seringkali menghasilkan check and balances ini ternyata bertentangan dengan tujuan. Seringkali pemerintah mengikuti kepentingan dari industri yang di saat yang sama bertentangan dengan mandat hukum. Hal ini antara lain disebabkan lebih ke persoalan ideologis. Wacana modernisasi telah mendorong pemerintah untuk membangun komitmen pada percepatan ekspansi model industri berskala luas. Agen-agen pemerintah telah terjebak pada paham dimana investasi merupakan cara yang paling efektif untuk pembangunan ekonomi dan pengentasan kemiskinan, meningkatkan neraca perdagangan, meningkatkan teknologi dan melink-annya dengan sektor-sektor ekonomi dan jasa untuk menstimulasi pembangunan pedesaan.

kehadiran skema pembangunan pertanian serta korporasi komersilnya. Akuisisi tanah model baru ini dilabelkan sebagai 'kolonialisme baru' (*new colonialism*) dan perampasan tanah global (*international land grab*).



Gb.10. Mekanisme Akuisisi Tanah
 Sumber: Data primer 2012

Selain formulasi kebijakan, investasi seolah juga diberikan privelese dengan fasilitasi yang diberikan oleh lembaga donor seperti dicontohkan oleh Daniel (2009) dengan adanya paket promosi investasi yang difasilitasi oleh IFC dan FIAS dengan detail produknya: 1) *aces to land product* (ini dilakukan dengan *accessing land*-mendesain dan mengimplementasikan sistem yang lebih efektif untuk membuat ekspansi investasi maupun investasi baru menjadi lebih mungkin; *securing land*-dilakukan dengan mengembangkan prosedur yang lebih sederhana dan transparan bagi investor untuk memperoleh lahan dan kepastian/keamanan hak atas properti yang mereka miliki dengan harga transaksi yang rendah; *developing land*-menyederhanakan perjanjian yang melibatkan multi agen untuk mempersingkat waktu dan menghemat biaya bagi para

investor unt bisa memperoleh persyaratan yang lebih aman); 2) *investing across border project*, merupakan model studi banding (*benchmarking*) untuk membandingkan kualitas iklim investasi di berbagai negara, mengidentifikasi *good practices* dalam desain kebijakan investasi dan implementasinya serya menstimulasi reformasi kebijakan investasi di negara yang menjadi klien; 3) *land market for investment product*, terkait dengan upaya mengakses tanah, mengamankan property dan kepastian waktu serta biaya untuk memperoleh ijin pengembangan lahan.

Dalam proses atau mekanisme akuisisi tanah inilah (German, 2011: 39) mencatat adanya lima gap dalam penerapan legislasi yang tidak seimbang: 1) banyak proyek yang diimplementasikan tanpa persetujuan (baik ijin investasi, sertifikat tanah atau ijin lingkungan (amdal). Dalam ketiadaan penerapan yang dianggap sah secara hukum dan pengawasan dalam implementasinya, tindakan pemerintah telah mengabaikan prosedur konsultasi dengan pemegang hak ulayat); 2) ditemukan dalam upaya untuk menetapkan zone agroekologis; 3) batasan dalam durasi penyewaan tanah banyak dilanggar; 4) kegagalan kesepakatan dalam proses konsultasi untuk menempatkan masyarakat dengan prinsip *free, prior and informed*. Proses konsultasi lemah meskipun secara hukum sudah ada prosedur yang dimandatkan; 5) Absennya pengawasan investasi dan sanksi bagi para pelanggar.

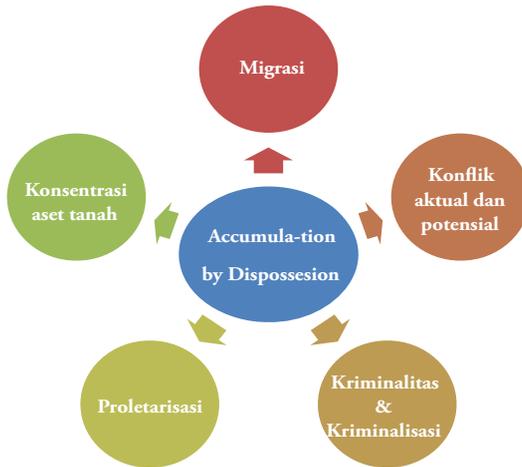
Dampak Akuisisi Tanah

Akuisisi tanah meskipun digembargemborkan sebagai solusi terbaik mengatasi multikrisis dan sebagai strategi memacu pembangunan yang lebih efektif, pada kenyataannya memunculkan banyak dampak negatif. Mengacu pada Quizon (2012), dampak umum yang terjadi adalah pengusiran petani kecil dari tanah-tanah mereka ketika pemerintah secara resmi mengklaim tanah-tanah mereka dengan sebutan '*public*', '*surplus*' atau '*unused*', baik pada hutan maupun padang rumput yang disewakan kepada investor asing. Quizon juga mencatat bahwa kebanyakan kesepakatan dilakukan secara diam-diam tanpa proses lelang publik dan informasi yang terbuka karena kesepakatan ini diperlakukan sebagai transaksi swasta (meskipun pemerintah asing terlibat sebagai investor). Dengan sedikit informasi dan konsultasi, masyarakat lokal banyak yang tidak menyadari proses ini sampai pada saat mereka tiba-tiba dipaksa meninggalkan tanahnya ketika operasi pembersihan tanah dimulai.

Absennya transparansi ini juga memicu terjadinya korupsi. Tanah-tanah dikonversi dari produksi pertanian skala kecil ke perkebunan raksasa yang mengabaikan para petani sebagai pengolah awalnya dan akhirnya hilanglah keahlian bertani dalam sebuah generasi.

Sementara itu, La Via Campesina (2008:27) mencatat bahwa *land grabbing* telah mengingkari keberadaan tanah-tanah untuk komunitas, merusak *livelihood*, mengurangi ruang politik bagi kebijakan pertanian yang berorientasi pada petani serta menciptakan pasar yang berorientasi pada agribisnis dan perdagangan dunia dibandingkan produksi pertanian berkelanjutan untuk pasar lokal dan nasional. *Land grabbing* mempercepat kerusakan ekosistem dan krisis iklim, karena tipe yang berorientasi monokultur, menghendaki produksi pertanian industrial yang membutuhkan lahan. Dampak yang mengemuka adalah bahwa para pekerja, petani dan komunitas lokal akan kehilangan akses tanah bagi pemenuhan produksi pangan mereka. Terjadi restrukturisasi tanah dimana tanah-tanah yang berada dalam kontrol pihak asing berubah dari lahan garapan skala kecil atau hutan menjadi kompleks besar yang terhubung dengan pasar besar di luar negeri. Mengacu pada Anna Bolin, seiring meningkatnya jumlah akuisisi tanah di dunia mulai tahun 2008, meningkat pula laporan di media dari ornop mengenai pengusuran dan pengusiran, bukan penciptaan lapangan kerja dan pembangunan.

Kajian yang ada juga menunjukkan bahwa banyak investasi tidak memenuhi harapan dalam penciptaan lapangan kerja dan manfaat yang berkelanjutan, tetapi justru memperburuk kondisi masyarakat dari sebelumnya. Mengacu pada Grain, Arduino, 2012:346 *land grabbing* memicu dampak antara lain: meningkatkan harga pangan, membuat kelompok miskin dan kekurangan pangan menjadi semakin rentan, memperburuk instabilitas dan kesenjangan, menciptakan konflik diantara stakeholder yang berbeda (khususnya kelompok etnik) akibat berkurangnya kontrol atas sumberdaya alam dan juga berkaitan dengan praktek-praktek gelap yang jamak terjadi. Secara ringkas dampak *land grabbing* dapat dilihat dalam ilustrasi berikut:



Gambar 11. Dampak Akuisisi Tanah
 Sumber: Data Primer, 2012

Land Grabbing di Indonesia

Indonesia merupakan salah satu negara yang menjadi sorotan dalam debat mengenai *land grabbing*. Sebagaimana dikutip dalam Anseeuw (2012), Indonesia adalah bagian dari Asia yang dalam peta investasi menjadi negara target kedua setelah Afrika. Kombinasi antara sumberdaya yang melimpah, dan kinerja pengelolaan pemerintahan yang buruk, menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara favorit bagi investor untuk menanamkan modalnya. Hal ini semakin dimuluskan dengan ambisi dari pemerintah Indonesia sendiri yang sangat menyambut baik kedatangan investasi karena dianggap sebagai jalan cepat untuk menggempuk pundi-pundi sekaligus mengejar ‘gelar prestisius’ sebagai negara penyuplai pangan dan pengeksport sawit nomor satu dunia. Perampasan tanah yang terjadi di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari kebijakan nasional melalui Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI). MP3EI yang dibangun diatas model kerjasama pemerintah dan swasta atau *Public Private Partnership* (PPP) secara nyata menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan prioritas yang dikejar. Melalui kebijakan inilah dengan jelas dinyatakan bahwa Indonesia memosisikan diri sebagai basis ketahanan pangan dunia, pusat pengolahan produk pertanian, perkebunan, perikanan dan sumber mineral disamping sebagai pusat mobilitas logistik global. Semua sektor

usaha yang berbasis sumberdaya alam ini akan menjadi legimitasi pada eksploitasi sumberdaya alam besar-besaran dan tentu saja pengadaan tanah yang menjadi basis pengerukan sumberdaya alam tersebut.

Dokumentasi mengenai *land grabbing* di Indonesia dicatat dengan sangat baik dalam berbagai riset dan penelitian yang mulai banyak menaruh perhatian pada topik ini. Ben White, Mc Charty, Tania Li, Affif, Savitri, Yando Zakaria, dan Yanuardy, adalah beberapa penulis yang berupaya menampilkan wajah *land grabbing* di Indonesia. Kasus ekspansi perkebunan sawit dan proyek pertanian pangan skala besar (*food estate*) adalah dua dari sekian skenario *land grabbing* yang banyak mendapat sorotan.

Sebagaimana dicatat AGRA (2010) bentuk-bentuk perampasan tanah di Indonesia banyak terjadi terutama selama periode 2004 sampai dengan 2010. Bentuk-bentuk perampasan ini sendiri sebenarnya berlandaskan pada monopoli tanah yang telah dibangun selama 32 tahun pada masa Orde Baru (1966-1998) yang terutama terjadi dalam bentuk konsentrasi penguasaan tanah-tanah pertanian melalui skema Revolusi Hijau, penguasaan tanah-tanah perkebunan melalui skema Hak Guna Usaha (HGU), penguasaan tanah-tanah hutan melalui konsesi Hak Pengusahaan Hutan (HPH), Hutan Tanaman Industri (HTI), penetapan kawasan taman nasional, penguasaan tanah-tanah pertambangan melalui konsesi pertambangan seperti kontrak karya pertambangan, serta konsentrasi penguasaan tanah untuk pembangunan infrastruktur, pemukiman (properti), dan pembangunan infrastruktur militer.

Bentuk-bentuk perampasan tanah yang terjadi saat ini juga dapat dikatakan tidak jauh berbeda dengan yang sudah terjadi di masa Orde Baru, yang membedakannya adalah mitos tentang krisis dan peruntungan dari apa yang disebut dengan ‘outer islands’ atau pulau-pulau terluar Indonesia’. Kedua mitos inilah yang dipakai untuk mendongkrak dan mempopulerkan perusahaan sumber pangan skala besar dan sumber energi alternatif (biofuel) sebagai sebuah ‘kebutuhan’ dan ‘keharusan’.

Mitos tentang krisis pangan, krisis keuangan dan krisis energi pada kenyataannya hanya merupakan sebuah pintu masuk untuk memuluskan jalan bagi para investor. Mitos ini diperkuat dengan ketersediaan sumberdaya yang melimpah yang ada di pulau-pulau terluar Indonesia (outer islands). Rasionalitas yang dibangun oleh pemerintah adalah menganggap pulau-pulau luar (*outer islands*) sebagai ruang untuk

mengelaborasi proyek-proyek nasional yang ambisius dengan cara mengatur ruang dan penggunaan tanah dalam satu pola yang mereka inginkan. Pulau-pulau luar ‘*outer island*’ dianggap sebagai lokasi yang paling ideal menjadi target investasi karena: memiliki tanah yang belum diusahakan dalam jumlah yang melimpah (*marginal land*) dan tingkat kepadatan penduduk yang rendah.

Mengacu pada Laksmi (2011), serangkaian formulasi kebijakan pendukung pun tiba-tiba dimunculkan seperti misalnya: Inpres No 1 Tahun 2006 tentang supply dan pemanfaatan biofuel sebagai energy alternative atau Perpres No 5 Tahun 2008 tentang Investasi Pangan Berskala Besar (*Food Estate*) (Junaidi, 2011). Semua ini menjadi semacam orkestrasi dari proses pangambilalihan tanah yang terjadi atau yang disebut Ito dkk (2011) sebagai bagian dari upaya untuk menaturalisasi. Hal inilah yang kemudian disebut sebagai mekanisme atau metode *land grabbing*. AGRA (2010) membedakan mekanisme atau metode perampasan tanah yang terjadi di Indonesia dalam masa enam tahun terakhir (2004-2010) menjadi 2 cara yaitu: metode lunak dan metode keras. Metode lunak dijalankan melalui kebijakan atau aturan-aturan yang dikeluarkan oleh negara (pemerintah). Melalui metode lunak ini, para perampas tanah rakyat (baik pemerintah maupun swasta) ditampilkan sebagai pihak yang mendukung pembangunan ekonomi, menciptakan lapangan pekerjaan dan menambah devisa negara, dan sebagainya, melalui program ataupun proyeknya. Sementara rakyat pemilik tanah ditampilkan sebagai pihak yang tidak mau berkorban bagi pembangunan, ataupun menghalangi pembangunan. Pihak pemerintah juga sering menyatakan bahwa hambatan investasi di Indonesia adalah masalah ganti rugi tanah. Metode lunak, cenderung menempatkan rakyat pemilik tanah sebagai pihak yang salah. Sementara di sisi lain, menempatkan posisi perampas tanah (baik pemerintah maupun swasta) sebagai pihak yang benar. Dengan metode lunak, perampasan tanah menjadi hal yang dibenarkan secara hukum dan aturan yang ada. Penggunaan aturan dan kebijakan, sejak undang-undang sampai dengan peraturan menteri yang merupakan aturan pelaksanaan dari undang-undang yang dirujuknya, merupakan satu kesatuan metode perampasan tanah yang dilakukan secara lunak. Sementara itu, metode keras dilakukan dengan menggunakan aparat keamanan negara baik berupa intimidasi, pemenjaraan, penculikan, pemidanaan dan teror terhadap kaum tani agar melepaskan tanahnya. Metode ini jamak dipakai, apabila metode lunak tidak memberikan hasil yang memuaskan.

DAFTAR PUSTAKA ANOTASI

- Alberto Alonso-Fradejas, 2012, "The Politics of Land Deals: Regional Perspectives" artikel pada *International Conference on Global Land Grabbing II*, Cornell University, Ithaca, USA, 17-19 October 2012.
- Alejandro Camargo, 2012, "Landscapes of Fear: Water Grabbing, Wetland Conservation, and the Violence of Property in Colombia" artikel pada *International Conference on Global Land Grabbing II*, Cornell University, Ithaca, USA, 17-19 October 2012.
- Aliansi Gerakan Reforma Agraria (AGRA). 2010. *Perampasan Tanah: Sebab, Bentuk dan Akibatnya bagi Kaum Tani*. www.farmland.org
- Alice B Kelly. 2011. Conservation Practice as Primitive Accumulation. *Journal of Peasant Studies*, 38(4) 683-701.
- Alison Graham, Sylvain Aubry, Rolf Künneemann and Sofía Monsalve Suárez. 2011. "The Role of the EU in Land Grabbing in Africa - CSO Monitoring 2009-2010 Advancing African Agriculture (AAA): The Impact of Europe's Policies and Practices on African Agriculture and Food Security", artikel dalam International Conference on Global Land Grabbing 6-8 April 2011. Land Deals Politics Initiative (LDPI). Journal of Peasant dan University of Sussex.
- Anseuw, Ward et all. 2012. *Land Rights and the Rush for Land. Findings of the Global Commercial Pressures on Land Research Project*. Rome: ILC
- Ansom, An. 2011. "The 'bitter fruit' of a new agrarian model: Large-scale Land Deals and Local Livelihoods in Rwanda", artikel dalam International Conference on Global Land Grabbing 6-8 April 2011. Land Deals Politics Initiative (LDPI). Journal of Peasant dan University of Sussex.
- Ar/Rmd. 2011. "Food Estate Bisa Berkembang Jika Infrastruktur Tersedia" dalam Majalah Bulanan "Legislatif", Tahun VIII Edisi XI, November 2011, Hal. 49 – 51.
- Arduino, Serena et al. 2012. *Contamination of Community Potable Water from Land Grabbing: A Case Study from Rural Tanzania*. *Water Alternatives Journal*, Volume 5, Issue 2, 2012.

- Bachelard, Michael. 1997. *The Great Land Grab: What Every Australian Should Know About Wik, Mabo and the Ten-Point Plan*. Victoria: Hyland House.
- Baka, Jennifer. 2012. The Immutability Mobile wasteland; How Wasteland Development Policies are Shaping Modern Land Politics in India. Paper dalam Konferensi Internasional Global Land Grabbing II, 17-19 Oktober, 2012. LDPI & Departement of Development Sociology, Cornell University, Ithaca, NY.
- Baletti, Brenda. 2011. "Saving the Amazon? Land Grabs and "Sustainable Soy" as the New Logic of Conservation" artikel dalam International Conference on Global Land Grabbing 6-8 April 2011. Land Deals Politics Initiative (LDPI). Journal of Peasant dan University of Sussex.
- Ballvé, Teo. 2011. "Territory By Dispossession: Decentralization, Statehood, And The Narco Land-Grab In Colombia", Artikel Dalam International Conference On Global Land Grabbing 6-8 April 2011. Land Deals Politics Initiative (Ldpi), Journal Of Peasant Dan University Of Sussex.
- Ballve, Teo. 2012. Grassroot Masquerades: Development, Paramilitaries, and Land Laundering in Colombia. Paper dalam Konferensi Internasional Global Land Grabbing II, 17-19 Oktober, 2012. LDPI & Departement of Development Sociology, Cornell University, Ithaca, NY.
- Behrman, J., R. Meinzen-Dick, et al. (2012). "The gender implications of large-scale land deals." Journal of Peasant Studies 39(1): 49-79, <http://www.tandfonline.com>, diakses pada 29 Mei 2012.
- Behrman, Julia, et all. 2011. *The Gender Implications of Large-Scale Land Deals*. IFPRI Discussion Paper. www.ifpri.org
- Benjaminsen, Tor A, et all. 2011. Conservation and Land grabbing in Tanzania. Artikel dalam International Conference on Global Land Grabbing 6-8 April 2011, Land Deals Politics Initiative (LDPI), Journal of Peasant dan University of Sussex.
- Bhushan Rawat, Vidya et all. 2011. *The impact of special economic zones in India: A case study of Polepally SEZ*. International Land Coalition (ILC)

- Bollin, Anna. 2011. *Fenomena Global Perampasan Tanah*. DTE 89-90. November 2011.
- Borras dan Franco. 2012. Global Land Grabbing and Trajectories of Agrarian Change A Preliminary Analysis. *Journal of Agrarian Change* 12(1) 34-59.
- Borras, Saturnino & Franco, Jennifer. "From Threat to Opportunity? Problems with the Idea of a "Code of Conduct" for Land-Grabbing".
- Borras, Saturnino & Franco, Jennifer. 2011. Political Dynamics of Land-grabbing in Southeast Asia: Understanding Europe's Role, Transnational Institute & the Just Trade Project.
- Borras, Saturnino Jr. & Franco, Jennifer. 2010. "Towards a Broader View of the Politics of Global Land Grab: Rethinking Land Issues, Reframing Resistance" artikel dalam International Conference on Global Land Grabbing 6-8 April 2011. Land Deals Politics Initiative (LDPI). Journal of Peasant dan University of Sussex.
- Brown, Von & Dick, Meizen. 2009. *Land Grabbing*. IFPRI Policy Brief 13. April 2009. www.ifpri.org.
- Burgers, Paul dkk. 2011. Fuelling Conflict: Overcoming asymmetry between global interest in vietnam and Indonesia. Dalam Development, 2011, 54(1), hlm 77-84. www.sidint.net.
- Calvan, Dennis F, et all. 2011. *Highly Extractive Fishing Activities and Privatization of Foreshore Lands Impact on the Everyday Lives of Municipal Fisherfolks*. International Land Coalition (ILC).
- Castañeda, Laura Silva. 2011. Certification Dispositifs And Land Conflicts: The Case Of The Roundtable On Sustainable Palm Oil (RSPO), artikel dalam International Conference on Global Land Grabbing 6-8 April 2011. Land Deals Politics Initiative (LDPI). Journal of Peasant dan University of Sussex.
- Celilie Friis & Anette Reenberg Friis, Cecilie dan Reenberg, Anette. 2010. *Land Grab in Africa: Emerging Land System Drivers in a Teleconnected World*. GLP Report No 1. GLP-IPO, Copenhagen.
- Clements, Elizabeth Alice & Fernandes, Bernardo Mançano, 2012, "Land Grabbing, Agribusiness and the Peasantry in Brazil and Mozambique", artikel pada *International Conference on Global Land Grabbing II*, Cornell University, Ithaca, USA, 17-19 October 2012.

- Cochet, Hubert & Merlet, Michel. 2011. "Land Grabbing and Share of the Value Added in Agricultural Processes. A New Look at the Distribution of Land Revenues", artikel dalam International Conference on Global Land Grabbing 6-8 April 2011. Land Deals Politics Initiative (LDPI). Journal of Peasant dan University of Sussex.
- Colchester, et al. 2006. *Promised Land: Palm Oil and Land Acquisition in Indonesia: Implication for Local Communities and Indigenous People*. England: Forest People Programme (FPP); Bogor: Perkumpulan Sawit Watch
- Cote, Muriel, 2012, "What's in a Right? Gold Mining, Decentralisation And Neoliberalisation In Burkina Faso", artikel pada *International Conference on Global Land Grabbing II*, Cornell University, Ithaca, USA, 17-19 October 2012.
- Cotula, L. and S. Vermeulen. 2009. "Deal or No Deal: The Outlook for Agricultural Land Investment in Africa." *International Affairs* (Royal Institute of International Affairs 1944-85(6): 1233-1247, <http://www.jstor.org/stable/40389014>, diakses 7 Juni 2012.
- Cuffaro, Nadia & Hallam, David. 2011. "Land Grabbing" in Developing Countries: Foreign Investors, Regulation and Codes of Conduct, artikel dalam International Conference on Global Land Grabbing 6-8 April 2011. Land Deals Politics Initiative (LDPI). Journal of Peasant dan University of Sussex.
- Da Vià, Elisa. 2011. "The Politics of 'Win-Win' Narratives: Land Grabs as Development Opportunity?", artikel dalam International Conference on Global Land Grabbing 6-8 April 2011. Land Deals Politics Initiative (LDPI). Journal of Peasant dan University of Sussex.
- Daeng, Samaludin. 2011. *Kedaulatan Pangan, Solusi Mengatasi Krisis Pangan. Free Trade Watch*. Edisi II, Juli 2011.
- Daniel, Shepard & Mittal, Anuradha. 2010. *(Mis) Investment in Agriculture, the Role of The International Finance Corporation in Global Land Grabs*. USA: The Oakland Institute. www.oaklandinstitute.org.
- Daniel, Shepard & Mittal, Anuradha. 2009. *The Great Land Grab Rush for World's Farmland Threatens Food Security for The Poor*. Oakland: The Oakland Institute

- Daniel, Shepard. 2011. "Finance Corporation in Promoting Agricultural Investment and Large-scale Land Acquisitions", artikel dalam International Conference on Global Land Grabbing 6-8 April 2011. Land Deals Politics Initiative (LDPI). Journal of Peasant dan University of Sussex.
- De Schutter, O. (2011). "How not to think of land-grabbing: three critiques of large-scale investments in farmland." *Journal of Peasant Studies* 38(2): 249-279, <http://www.tandfonline.com>, diakses 29 Mei 2012.
- De Schutter, Olivier. 2009. "Promotion and Protection of All Human Rights, Civil, Political, Economic, Social and Cultural Rights, Including the Right to Development", (Report of the Special Rapporteur on the Right to Food), Addendum: Large-Scale Land Acquisitions and Leases: a Set Of Minimum Principles and Measures to Address the Human Rights Challenge, UN General Assembly, Human Rights Council.
- Deininger, K. (2011). "Challenges posed by the new wave of farmland investment." *Journal of Peasant Studies* 38(2): 217-247, <http://www.tandfonline.com>, diakses 29 Mei 2012.
- FAO. 2007. "Panduan Sukarela untuk Mendorong Pemenuhan Hak atas Pangan yang Layak secara Progresif dalam Konteks Ketahanan Pangan Nasional". Dalam Mujib, Taufiqul. 2007. *Pangan dan Hak Asasi Manusia dalam Pembangunan*. Jakarta: Indonesian Human Rights Committee for Social Justice (IHCS); Norwegia: Norwegian Centre for Human Rights (NCHR).
- Fernandes, B. M., C. A. Welch, et al. (2010). «Agrofuel policies in Brazil: paradigmatic and territorial disputes.» *Journal of Peasant Studies* 37(4): 793-819, <http://www.tandfonline.com>, diakses pada 29 Mei 2012.
- Fortin, Claude Joel. 2011. "The Biofuel Boom and Indonesia's Oil Palm Industry: The Twin Processes of Peasant Dispossession and Adverse Incorporation in West Kalimantan" artikel dalam International Conference on Global Land Grabbing 6-8 April 2011. Land Deals Politics Initiative (LDPI). Journal of Peasant dan University of Sussex.

- German, Laura. 2011. *Contemporary Process of Large Scale Acquisition*.
www.cifor.org.
- Ginting, Longgena & Pye, Oliver. 2011. "Resisting Agribusiness Development: The Merauke Integrated Food and Energy Estate in West Papua, Indonesia", artikel dalam International Conference on Global Land Grabbing 6-8 April 2011. Land Deals Politics Initiative (LDPI). Journal of Peasant dan University of Sussex.
- Gironde, Christophe. 2012. The rubber-tree boom in Cambodia: Assessing Small Landholders' Optimism. Paper submitted for LDPI Land Grabbing II, September 2012.
- Gordon, Kathryn & Pohl, Joachim. 2010. Freedom of Investment Process, Responsible Investment in Agriculture. Paris: Organisation for Economic Co-operation and Development.
- Grain. 2009. *Seized: the 2008 Landgrab for Food and Financial Security*. Barcelona: Institute for National and Democratic Studies atas kerjasama dengan GRAIN.
- Guillozet, Kathleen & Bliss, John C. 2011. Household Livelihoods and Increasing Foreign Investment Pressure in Ethiopia's Natural Forests, artikel dalam International Conference on Global Land Grabbing 6-8 April 2011. Land Deals Politics Initiative (LDPI). Journal of Peasant dan University of Sussex.
- Guttal, Shalmali. 2011. Whose Land? Whose Resources. Development, 2011, 54 (1). www.sidintvelopment.net/development.
- Haboddin, M. 2011. Masyarakat Adat Melawan Perusahaan. *Governance*. Vol. 2. No. 1, November 2011, hal 25-41 (16).
- Hall, Derek, 2011, "Land Control, Land Grabs, and Southeast Asian Crop Booms", artikel dalam International Conference on Global Land Grabbing 6-8 April 2011, Land Deals Politics Initiative (LDPI), Journal of Peasant dan University of Sussex
- Hall, Derek. 2011. "Land Grabs, Land Control, and Southeast Asian Crop Booms." *Journal of Peasant Studies* 38(4), pp. 837-857.
- Hangzo, Pan Khan Khup dan Kuntjoro, Irene A. *'Land Grabbing' as a Food Security Phenomenon: a Critical Review*. www.rsis.edu.sg.
- Hirsch, Philip. 2011. "Titling against grabbing? Critiques and conundrums around land formalisation in Southeast Asia", artikel pada International Academic Conference on 'Global Land Grabbing'

- 6-8 April 2011. Future Agricultures Consortium Institute of Development Studies (IDS). University of Sussex, Brighton, UK.
- Hofman, I. and P. Ho (2012). "China's 'Developmental Outsourcing': A critical examination of Chinese global 'land grabs' discourse." *Journal of Peasant Studies* 39(1): 1-48, <http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/03066150.2011.653109>, diakses 29 Mei 2012.
- Jia-ching Chen, 2012, "Dividing Environments: Rural Dispossession, Land Enclosures and the Construction of Environmental Resources in China", artikel pada *International Conference on Global Land Grabbing II*, Cornell University, Ithaca, USA, 17-19 October 2012.
- Junaidi, Yulian. 2011. "Land Grabbing in Indonesia". Artikel dalam International Conference on Global Land Grabbing 6-8 April 2011, Land Deals Politics Initiative (LDPI), Journal of Peasant dan University of Sussex
- Kabiri, Ngeta. *Wildlife Conservation and Land Acquisitions A case Study of Tanzania Land Conservation Trust*. Artikel dalam International Conference on Global Land Grabbing 6-8 April 2011, Land Deals Politics Initiative (LDPI), Journal of Peasant dan University of Sussex
- Kaloustian, Jerry et al. 2011. *Land Grabbing for Food & Fuel Outsourcing a Rising Threat to the Right to Food*. www.humanrightsadvocates.org.
- Kenney-Lazar, Miles. 2011. "Dispossession, Semi-Proletarianization, And Enclosure: Primitive Accumulation and The Land Grab In Laos", artikel dalam International Conference on Global Land Grabbing 6-8 April 2011. Land Deals Politics Initiative (LDPI). Journal of Peasant dan University of Sussex.
- La via Campesina. 2008. *Stop Land Grabbing Now, Say NO to the principles of 'responsible' agro-enterprise investment promoted by the World Bank*.
- Lakshmi Balachandran, 2012, Elizabeth Herb, Shahbano Timirzi, Erin O'Reilly, 2012, " Everyone must eat? Liberia, Food Security and Palm Oil" artikel pada *International Conference on Global Land Grabbing II*, Cornell University, Ithaca, USA, 17-19 October 2012.

- Land and Power, The growing Scandal Surrounding the New Wave of Investment in Land. Oxfam Briefing Paper, 22 September 2011, www.oxfam.or/grow.
- Lavers, T. (2012). "Land Grab' as Development Strategy? The Political Economy of Agricultural Investment in Ethiopia." *Journal of Peasant Studies* 39(1): 105-132, <http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/03066150.2011.652091>, diakses pada 29 Mei 2012.
- Levien, M. (2011). "Special Economic Zones and Accumulation by Dispossession in India." *Journal of Agrarian Change* 11(4): 454-483, <http://dx.doi.org>, diakses pada 29 Mei 2012.
- Levien, Michael. 2011. "The Land Question: Special Economic Zones and the Political Economy of Dispossession in India" artikel dalam International Conference on Global Land Grabbing 6-8 April 2011. Land Deals Politics Initiative (LDPI). *Journal of Peasant dan University of Sussex*.
- Li, Tania. 2012. What is Land? Anthropological Perspectives on the Global Land Rush. Paper dalam Konferensi Internasional Global Land Grabbing II, 17-19 Oktober, 2012. LDPI & Departement of Development Sociology, Cornell University, Ithaca, NY.
- Li, Tania. M. 2011. Centering labor in the land grab debate. *Journal of Peasant Studies* 38(2), 281-298.
- Liu, Kan. 2012. "A Case Study of Land Transfer in Rural China". Paper submitted for LDPI Land Grabbing II, September 2012.
- Livingsage, Harold. 2010. Responding to 'Land Grabbing' and Promoting Responsible Investment in Agriculture. International Fund for Agricultural Development (IFAD). TNI's Global Land Grab Debate.
- Lorenzo Cotula, Sonja Vermeulen, Rebeca Leonard and James Keeley. 2009. Land grab or development opportunity? Agricultural investment and international land deals in Africa. London: FAO, IIED and IFAD.
- Lund, C. (2011). "Fragmented sovereignty: land reform and dispossession in Laos." *Journal of Peasant Studies* 38(4): 885-905, <http://www.tandfonline.com>, diakses pada 29 Mei 2012.

- M Borrás, Saturnino & Franco, Jennifer. 2012. Politics of Contemporary Global Land Grabbing. Presentation Material on ICCO, 23-25 July 2012, Bali-Indonesia.
- MacCarthy, John et al. 2012. A Land Grab Scenario for Indonesia? Diverse Trajectories and Virtual Land Grabs in the Outer Islands. www.future-agricultures.org.
- MacInnes, Megan. 2012. Corruption and Large-scale Land Acquisitions: an analysis of the role high corruption plays in enabling elite capture of land. Paper dalam Konferensi Internasional Global Land Grabbing II, 17-19 Oktober, 2012. LDPI & Departement of Development Sociology, Cornell University, Ithaca, NY.
- Malik, Mahnaz. 2011. Foreign Investment Into Agriculture: Investment Treaties And The Ability Of Governments To Balance Rights And Obligations Between Foreign Investors And Local Communities, artikel dalam International Conference on Global Land Grabbing 6-8 April 2011. Land Deals Politics Initiative (LDPI). Journal of Peasant dan University of Sussex.
- Mc Michael. 2012. The Land Grab and Corporate Food Regime Restructuring. *Journal of Peasant Studies* 39(3-4) 681-701.
- Mc.Charty, et al. Trajectories of Land Acquisition and enclosure: development schemes, virtual land grabs and green acquisitions in Indonesia's Outer Islands. *The Journal of Peasant Studies* Vol 39, No. 2, April 2012, 521-549.
- McMichael, Philip. 2011. "The Food Regime in the Land Grab: Articulating 'Global Ecology' and Political Economy", artikel dalam International Conference on Global Land Grabbing 6-8 April 2011. Land Deals Politics Initiative (LDPI). Journal of Peasant dan University of Sussex.
- Mutopo, P. (2011). "Women's struggles to access and control land and livelihoods after fast track land reform in Mwenzezi District, Zimbabwe." *Journal of Peasant Studies* 38(5):1021-1046, <http://www.tandfonline.com>, diakses 29 Mei 2012
- Mutopo, Patience dan Chiweshe, Manase, 2012, "Large Scale Land Deals, Global Capital and the Politics of Livelihoods: Experiences of Women Small- Holder Farmers in Chisumbanje, Zimbabwe", artikel pada *International Conference on Global Land Grabbing II*,

Cornell University, Ithaca, USA, 17-19 October 2012.

- Noor, Mohammad. 1996. *Padi Lahan Marjinal*. Jakarta: Penebar Swadaya.
- Ojeda, Diana. 2011. "Whose Paradise? Conservation, Tourism and Land Grabbing in Tayrona Natural Park, Colombia", artikel dalam International Conference on Global Land Grabbing 6-8 April 2011. Land Deals Politics Initiative (LDPI). Journal of Peasant dan University of Sussex.
- Oxfam. 2012. Our Land, Our Lives: time Out on the Global Land Rush. Oxfam Briefing Note, October-2012.
- Quizon, Antonio. 2012. *The Rush for Asia's Farmland: Its Impact on Land Rights and Security of the Rural Poor*. LOK NITI Volume 18/I/2012, page 7-18.
- Ravanera, Roel R & Gorra, Vanessa. 2011. *Commercial Pressures on Land in Asia: An Overview*. International Land Coalition (ILC).
- Reilly, Michael dan Willenbockel, Dirk. 2010. Managing Uncertainty: a Review of Food System Scenario Analysis and Modelling. *Phil. Trans. R. Soc. B* (2010) 365, 3049–3063
- Rmd. "SID jadi Rujukan Cetak Sawah Baru". Majalah Bulanan *Legislatif*, Tahun VIII Edisi XI, November 2011, Hal. 19 – 20.
- Rmd. 2011. "Investasi Pertanian Perlu didukung Infrastruktur". Majalah Bulanan *Legislatif*, Tahun VIII Edisi XI, November 2011, Hal. 21 – 23.
- Balakrishnan, Sai, 2012, Land Conflicts along Highways In India: A Commentary On India's Agrarian To Industrial Transition, artikel pada *International Conference on Global Land Grabbing II*, Cornell University, Ithaca, USA, 17-19 October 2012.
- Saptariani, et al. 2011. *Land Grabbing and Women Struggle from Oppression. Stories of Women Struggle Facing the Impact of Land Grabb In Lowland And Upland Villages of Java*. Bogor-Indonesia: RMI – The Indonesian Institute for Forest and Environment.
- Saragih, Jefri. 2010. Food Barn and energy projects in Merauke, Indonesia. LOK NITI Vol. 18/1, 2012, Asian NGO Coalition for Agrarian Reform and Rural Development (ANGOC), Quezons City, Philippines.

- Sauer, Sérgio & Leite, Sergio Pereira. 2011. "Agrarian structure, foreign land ownership, and land price in Brazil", artikel dalam International Conference on Global Land Grabbing 6-8 April 2011. Land Deals Politics Initiative (LDPI), Journal of Peasant dan University of Sussex.
- Savitri, Laksmi Adriani. 2011. "Gelombang Akuisisi Tanah untuk Pangan: Wajah Imperialisme Baru." Makalah Seminar Nasional Politik Penguasaan Ruang Berkeadilan." Bogor: Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif (JKPP), 25 Januari 2011.
- Schneider, Alison Elizabeth. 2011. "What shall we do without our land? Land Grabs and Resistance in Rural Cambodia", artikel dalam International Conference on Global Land Grabbing 6-8 April 2011. Land Deals Politics Initiative (LDPI). Journal of Peasant dan University of Sussex.
- Schoneveld, George C. 2011. The Anatomy of Large Scale Farmland Acquisition. *Working paper 85*. CIFOR, Bogor, Indonesia.
- Smaller, Carin & Mann, Howard. 2009. *A Thirst for Distant Lands: Foreign Investment in Agricultural Land and Water*. <http://www.iisd.org>.
- Smaller, Carin. 2005. *Planting the Rights Seed: a Human Rights Perspective on Agriculture Trade and the WTO*. Geneva: 3d & Iatp.
- Sonia, Arellano-López, 2012, Conflicting land use agendas: environment, indigenous landrights and development in central Bolivia. The case of the Siboro-Sécure Indigenous Territory and National Park (TIPNIS), 2012, "The Politics of Land Deals: Regional Perspectives" artikel pada *International Conference on Global Land Grabbing II*, Cornell University, Ithaca, USA, 17-19 October 2012.
- Stephens, Phoebe. 2011. "The Global Land Grab: An Analysis of Extant Governance Institutions". *International Affairs Review*. Vol XX, No. 1: Summer 2011.
- Syarief, Effendi. 2004. *Melawan Ketergantungan Pada Minyak Bumi. Minyak Nabati dan Biodiesel sebagai Alternatif dan Gerakan*. Yogyakarta: Insist Press.
- Takeshi Ito, Noer Fauzi Rachman, Laksmi A. Savitri. 2011. Naturalizing Land Dispossession: A Policy Discourse Analysis of the Merauke Integrated Food and Energy Estate, artikel dalam International Conference on Global Land Grabbing 6-8 April 2011. Land Deals

- Politics Initiative (LDPI). *Journal of Peasant dan University of Sussex*.
- Tambler, Adrian et al. 2011. *The Competition for Family dairy farmer's land in Uruguay and their strategies for confronting it*. International Land Coalition
- Taylor, Michael & Bending, Tim. 2009. *Increasing Commercial Pressure on Land: Building a Coordinated Response* (Discussion Paper). Rome: International Land Coalition.
- Telapak. 2009. *Up For Grabs Deforestation and Exploitation in Papua's Plantations Boom*, Bogor: Environmental Investigation Agency & Telapak.
- Tienhaara, Kyla & Smith, Wynet. 2011. "Negotiating Carbon Concessions in Developing Countries: Issues of Capacity, Confidentiality & Corruption", artikel dalam International Conference on Global Land Grabbing 6-8 April 2011. Land Deals Politics Initiative (LDPI). *Journal of Peasant Dan University of Sussex*
- Tolentino, Maricel & Don E Marquez, Nathaniel. 2012. *Land Investment: A Stakeholder analysis*. LOK NITI Vol.18/2, 2012. Asian NGO Coalition for Agrarian Reform and Rural Development (ANGOC), Quezon City, Philippines.
- Van Noorloos, Femke. 2011. *Residential Tourism Causing Land Privatization and Alienation New Pressures on Costa Rica Coasts*. *Development*, 2011, 54 (1).
- Van Oppeln, Contanze & Schneider, Rafael. 2009. *Land Grabbing-poor People are Losing the Ground Beneath their Feet*. *In Brief* No.8 April 2009.
- Veldman, Muriel et al. 2011. *Socio-Economic impact of Commercial Exploitation of Rwandan Marshes a Case Study of Sugar Cane Production in Rural Kigali*. International Land Coalition.
- Visser, O. and M. Spoor (2011). "Land grabbing in Post-Soviet Eurasia: the World's Largest Agricultural Land Reserves at Stake." *Journal of Peasant Studies* 38(2): 299-323, <http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/03066150.2011.559010>, diakses 29 Mei 2012.
- White, Ben & Julia. 2012. *Gender Experiences of Dispossession" Oil Palm Expansion in a Dayak Hibun Community in West Kalimantan*. *Journal of Peasant Studies*, Volume 39, Issue 3-4, p. 995-1016.

- White, Ben dan Anirban, Dasgupta. 2010. Agrofuels Capitalism: a view from political Economy. *Journal of Peasant Studies* 37(4), 593-607.
- White, Ben et all. 2012. The new enclosures: critical perspectives on corporate land deals. *the Journal of Peasant Studies*. Vol. 39, Nos. 3-4, July-October 2012, 619-647.
- White, Ben. 2009. "Laba dan Kuasa Dicat Warna Hijau: Catatan Mengenai Biofuel, Agribisnis dan Petani". Dalam *Jurnal Tanah Air*, Edisi Oktober-Desember, hal 238-257.
- Wirasaputra, Koesnadi. 2009. *Biofuel Sebuah Jebakan. Catatan dari Pusat Sumatera: Jambi, Riau dan Sumatera Selatan*. Setara-Walhi-Elang-Sawit Watch- Misereor.
- Yanuardy, Dian. 2012. Commoning, Dispossession Projects and Resistance: a Land Dispossession for Sand Iron Mining in Yogyakarta, Indonesia. Paper dalam Konferensi Internasional Global Land Grabbing II, 17-19 Oktober, 2012. LDPI & Departement of Development Sociology, Cornell University, Ithaca, NY.
- Ybarra, Megan. 2011. "Taming the Jungle, Saving the Maya Forest: The Military's Role in Guatemalan Conservation", artikel dalam International Conference on Global Land Grabbing 6-8 April 2011. Land Deals Politics Initiative (LDPI). Journal of Peasant dan University of Sussex.
- Zakaria, Yando dkk. 2011. *MIFEE Tak Terjangkau Angan Malind. Catatan Atas Upaya Percepatan Pembangunan MIFEE di Kabupaten Merauke, Papua*. Jakarta: Yayasan Pusaka.
- Zamchiya, P. (2011). "A Synopsis of Land and Agrarian change in Chipinge district, Zimbabwe." *Journal of Peasant Studies* 38(5): 1093-1122, <http://www.tandfonline.com>, diakses 29 Mei 2012.
- Zoe Brent, 2012, "Governance and Resistance in Jujuy: Territorial Discourses And Mechanisms Of Land Control", artikel pada *International Conference on Global Land Grabbing II*, Cornell University, Ithaca, USA, 17-19 October 2012.
- Zoomers, Annelies. 2010. 'Globalisation and the foreignisation of space: seven processes driving the current global land grab'. *Journal of Peasant Studies* 37(2), pp. 429-447, 2010.